



## Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma

Anisa Cahnia <sup>1)</sup>; Evi Lorita <sup>2)</sup>; Antonio Imanda <sup>3)</sup>; Bando Amin C. Kader <sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [anisyacahnia73@gmail.com](mailto:anisyacahnia73@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [antonioimanda@unived.ac.id](mailto:antonioimanda@unived.ac.id) ; <sup>3)</sup> [evilorita@unived.ac.id](mailto:evilorita@unived.ac.id) ; <sup>4)</sup> [bandoamin@unived.ac.id](mailto:bandoamin@unived.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [30 Oktober 2024]

Revised [02 Desember 2024]

Accepted [04 Desember 2024]

### KEYWORDS

Implementation, Public policy, BAPPEDA, Regional Government Information System.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Seluma. Melalui analisis data dan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 4 orang informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori Edward III 1984 (dalam Tresiana & Duaji, 2019:59) ada 4 (empat) indikator yang digunakan yaitu : 1) Komunikasi: Komunikasi antara BAPPEDA kabupaten Seluma terhadap Kemendagri maupun OPD/SKPD pemerintah kabupaten Seluma dilakukan melalui surat, grup WhatsApp, Zoom Meeting maupun melakukan koordinasi langsung. Penyampaian informasi OPD/SKPD yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan juga sudah lengkap dan jelas. Data informasi disampaikan dengan cara menginput data informasi melalui portal satu data indonesia (SDI). 2) Sumberdaya: Sumberdaya yang ada di BAPPEDA kabupaten Seluma juga sudah cukup baik dan terpenuhi, kemampuan operator sudah cukup mumpuni dalam mengoperasikan SIPD walaupun belum secara maksimal karena kurangnya program diklat bimtek dan pelatihan lainnya untuk operator SIPD di bappeda kabupaten seluma, dana anggaran berasal dari APBD juga sudah mencukupi serta fasilitas yang digunakan dalam implementasi SIPD juga sudah memadai. 3) Disposisi: Sikap para implementor di BAPPEDA kabupaten Seluma sudah cukup baik, para implementor sudah memiliki sikap ketegasan dan berkeinginan dalam mengimplementasikan SIPD dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 4) Struktur Birokrasi: Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan SIPD sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), BAPPEDA kabupaten Seluma mempunyai wewenang menyusun dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPd yang penyusunannya melalui SIPD.

### ABSTRACT

The aims this study was to determine the implementation of Regional Government Information System (SIPD) development planning agency of Seluma district. Through analysis of data and information obtained at the research location. This study was a qualitative study presented descriptively. The informants of this study were 4 informants. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. Based on the results of the study and discussion using the theory of Edward III 1984 (in Tresiana & Duaji, 2019:59) there are 4 (four) indicators used, namely: 1) Communication: Communication between the BAPPEDA of Seluma Regency and the Ministry of Home Affairs and OPD/SKPD of the Seluma Regency government was carried out via letters, WhatsApp groups, Zoom Meetings or direct coordination. The submission of OPD/SKPD information required in the preparation of development planning documents is also complete and clear. Information data is submitted by inputting information data through the One Data Indonesia portal. 2) Resources: The resources available at the BAPPEDA of Seluma Regency are also quite good and fulfilled, the operator's ability was quite capable of operating regional government information system although not optimally due to the lack of training programs and other training for regional government information system operators at the Bappeda of Seluma Regency, the budget funds from the APBD are also sufficient and the facilities used in the implementation of regional government information system are also adequate. 3) Disposition: The attitude of the implementers at the BAPPEDA of Seluma Regency was quite good. Implementors already have a firm attitude and desire to implement regional government information system in preparing regional development planning documents. 4) Bureaucratic Structure: The bureaucratic structure in implementing regional government information system policies is quite good because it was in accordance with standard operating procedures (SOP), BAPPEDA Seluma district has the authority to prepare development planning documents, namely RPJPD, RPJMD, and RKPd, the preparation of which is through SIPD.

### PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini mengharuskan setiap negara mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Kemajuan teknologi adalah salah satu faktor yang mengharuskan negara mengikuti perkembangan zaman terutama Indonesia agar dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya.

Kemajuan teknologi ini dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak terutama bagi pemerintahan yang mana kemajuan teknologi ini dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi yang dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu tujuan dari reformasi pemerintahan adalah untuk mewujudkan *good governance*. Salah satu faktor dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemerintahan baik untuk pelayanan serta pembangunan. Guna mewujudkan pemerintah yang bisa menyelenggarakan *good governance*, penting bagi pemerintah untuk membangun kerjasama yang dilandasi pada hubungan yang partisipatif, responsif dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (Zaman dan Nurdiwati, 2020: 67).

Menurut Sadjijono (dalam Maryam 2016: 3) *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Dalam mewujudkan *good governance* diperlukan inovasi dalam pemerintahan yang semula secara manual menjadi *electronic Government* atau *e-government*. *E-Government* adalah suatu upaya pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ada beberapa definisi *e-government* dalam bukunya yang berjudul membangun aplikasi *e-government* Indrajit (2002: 3), menyebutkan berbagai definisi *e-government* baik yang dikemukakan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Menurut *the word Bank group* definisi *e-government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Kemudian Ronaghan (dalam Uddin, 202:3) menyebutkan bahwa *e-government* merupakan upaya dalam pemanfaatan teknologi oleh lembaga pemerintahan guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dunia usaha, atau instansi pemerintahan lainnya dengan menggunakan *Wide Area Network (WAN)*, *mobile computing*, ataupun internet.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan juga bertujuan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Tujuan di terapkannya *e-government* adalah agar hubungan pemerintah yang baik dengan masyarakat dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis agar tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan salah satu program pemerintah yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam bentuk *e-government*. SIPD merupakan sistem yang memuat informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Dalam upaya mengintegrasikan SIPD tersebut telah disusun dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yaitu sebagai pengganti Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang SIPD.

Tujuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini adalah untuk menyinergikan pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memuat berbagai Informasi pemerintah daerah diantaranya memuat informasi pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah lembaga yang harus bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, BAPPEDA sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional serta berdasarkan data informasi yang akurat dari seluruh OPD/SKPD pemerintah daerah, dengan adanya SIPD maka akan memudahkan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah terdiri dari RPJPD



(rencana pembangunan jangka panjang daerah), RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), RKPD (rencana kerja pemerintah daerah), RENSTRA (rencana strategis) SKPD dan RENJA (rencana kerja) SKPD.

Pemerintah kabupaten Seluma sedang gencar dalam menjalankan program Satu Data Indonesia (SDI). Dalam mendukung program tersebut pemerintah kabupaten melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di kabupaten Seluma salah satunya dokumen perencanaan RKPD menggunakan SIPD sejak tahun 2020.

Penggunaan SIPD digunakan dari seluruh tingkatan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, serta OPD/SKPD yang saling berkaitan satu sama lain yang jumlah keseluruhannya tertera dalam table di bawah ini:

**Tabel 1 Jumlah OPD Kabupaten Seluma**

OPD/SKPD Pemerintah Kabupaten Seluma	34 OPD/SKPD
Kecamatan	14 Kecamatan
Desa	182 Desa
Kelurahan	20 Kelurahan

Sumber: Data Internal Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2023

Bappeda Kabupaten Seluma merupakan OPD/SKPD yang berperan penting dalam penggunaan SIPD khususnya dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seluma yaitu sebagai admin SIPD. Untuk masuk ke SIPD dapat langsung mengakses link [Http://sipd-ri.kemendagri.go.id/login](http://sipd-ri.kemendagri.go.id/login) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan cara pilih provinsi, pilih kabupaten/kota masukan username dan password.

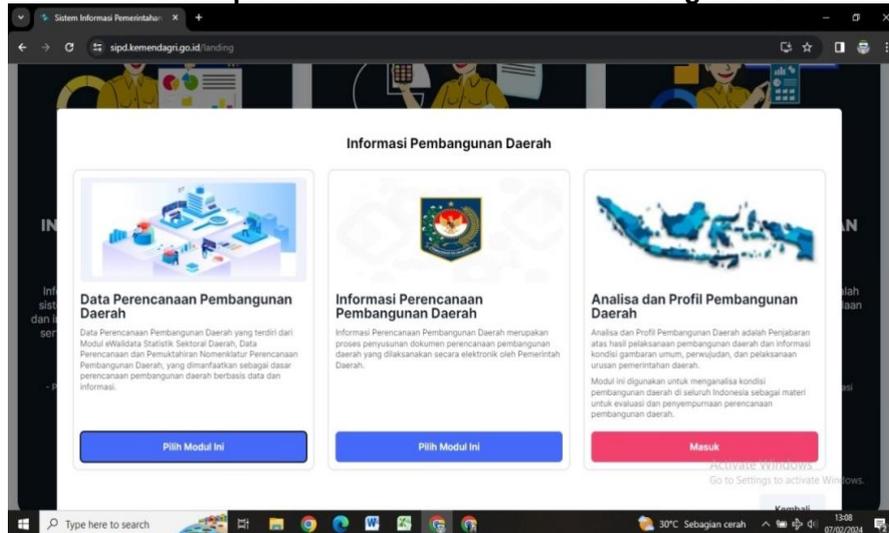
Di dalam SIPD Permendagri memuat berbagai informasi pemerintah daerah yaitu informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Tampilan SIPD dapat di lihat sebagai berikut :

**Gambar 1 Tampilan Informasi Pemerintah Daerah Di SIPD**



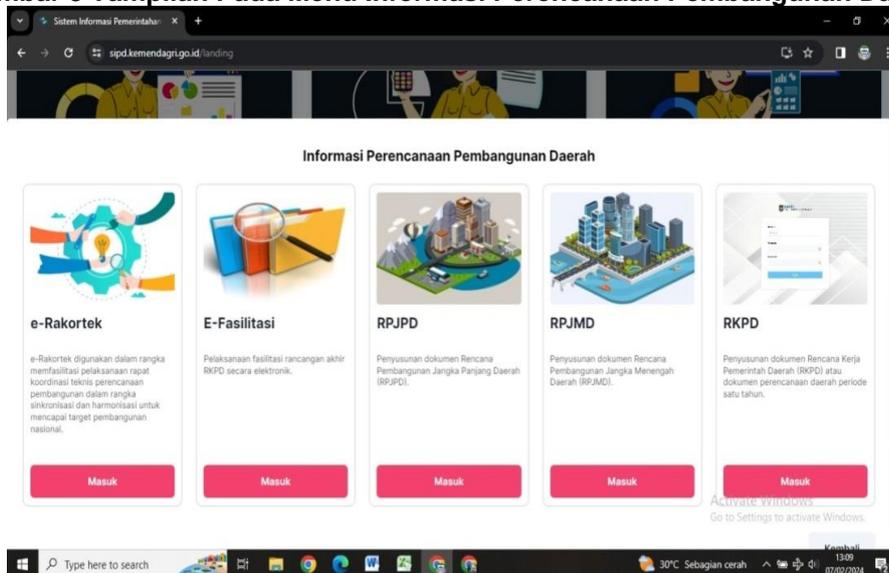
Dari tampilan di atas dapat dilihat bahwa SIPD Kemendagri memuat 3 Informasi yang pertama Informasi Pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk penelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

Yang kedua yaitu informasi keuangan daerah, informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan monitoring dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Yang ketiga yaitu informasi pemerintahan daerah lainnya, informasi pemerintahan daerah lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

**Gambar 2 Tampilan Pada Menu Informasi Pembangunan Daerah**

Pada menu informasi pembangunan daerah muncul menu pilihan yang terdiri dari Data Perencanaan Pembangunan Daerah, Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Analisis Dan Profil Pembangunan Daerah. Data perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari modul eWalidata Statistik Sektoral Daerah, Data Perencanaan dan Pemuktahiran Nomenklatur Perencanaan pembangunan Daerah, yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi.

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara elektronik oleh pemerintah daerah. Analisa dan profil pembangunan daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan informasi kondisi gambaran umum, perwujudan, dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah modul ini digunakan untuk menganalisa kondisi pembangunan daerah di seluruh Indonesia sebagai materi untuk evaluasi dan penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.

**Gambar 3 Tampilan Pada Menu Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada menu Informasi Pembangunan Daerah terdapat lima tampilan yaitu e-Rakortek, E-Fasilitasi, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pada menu RKPD digunakan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Terdapat berbagai manfaat yang bisa dirasakan apabila SIPD dapat diterapkan dengan baik yaitu bisa membuat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam penyusunan dokumen RKPD menjadi lebih efektif dan tepat waktu. Kemudian mampu meningkatkan kualitas perencanaan, karena di dalam aplikasi SIPD menyediakan data pembangunan daerah yang berguna untuk kegiatan perencanaan, terciptanya rumah legal *database* pembangunan bagi



seluruh daerah yang berguna sebagai bahan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah. lalu dalam halpengumpulan data dari SKPD menjadi lebih efektif dan efisien sehingga bisa menghemat waktu serta anggaran.

Berdasarkan pra penelitian dilapangan ditemukan persoalan yang sering menjadi faktor penghambat implementasi SIPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah yaitu sumberdaya manusia, hal ini dikarenakan operator di Bappeda Kabupaten Seluma tidak begitu memahami dalam mengoperasikan SIPD itu sendiri.

Hal tersebut menjadi faktor penghambat yang membuat implementasi SIPD dalam perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Seluma belum maksimal. Meskipun demikian, Bappeda Kabupaten Seluma tetap berusaha untuk menggunakan sistem ini dalam proses perencanaannya hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih empat tahun.

## LANDASAN TEORI

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007: 145), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (to complete).

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat, dalam hal ini terdapat dua pihak yang berperan yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Kegiatan implementasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut Edward III 1984 (dalam Tresiana & Duadji, 2019:59) terdapat 4 (empat) isu pokok yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar menjadi efektif yaitu:

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. Sumber daya, Berkenaan dengan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini yang berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
3. Disposisi, Berkenaan dengan ketersediaan para implementator untuk carry out kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, Berkenaan dengan kesesuaian struktur birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak menjadi bureaucratic fragmentation karena struktur birokrasi ini menjadi proses implementasi menjadi jauh lebih efektif.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma menggunakan teori implementasi George Edward III. Alasan penulis menggunakan landasan teori tersebut karena variabel-variabel yang ada didalamnya cocok untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Seluma, peneliti menilai bahwa teori tersebut akan lebih komprehensif dalam pencarian data dibandingkan dengan teori-teori lainnya.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian dan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang atau sebagaimana adanya. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Data primer yaitu jenis data penelitian yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data tersebut dari informan melalui serangkaian wawancara. (2) Data sekunder yaitu jenis data penelitian yang

diperoleh dari teknik dokumentasi dan pemanfaatan sumber-sumber yang berkaitan dan dapat mendukung obyek yang akan di teliti. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah: wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk teks naratif yang didasarkan dari indikator-indikator untuk mengukur implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.

Dalam implementasi kebijakan pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya yang dapat mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edward III 1984 (dalam Tresiana & Duadji, 2019:59) Ada 4 (empat) isu pokok yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar menjadi efektif yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### Komunikasi

Komunikasi, berkaitan dengan koordinasi antara pihak yang terkait. Komunikasi juga memegang peranan penting dan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan publik. Komunikasi mempengaruhi implementasi kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan hal yang menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana para implementor kebijakan mengkomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

Pada penelitian ini indikator komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi Kemendagri sebagai (pembuat kebijakan) sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) kepada BAPPEDA kabupaten Seluma maupun komunikasi BAPPEDA kabupaten Seluma kepada organisasi perangkat daerah (OPD/SKPD) pemerintah kabupaten Seluma terkait implementasi SIPD. Komunikasi dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sub indikator yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi dan media yang digunakan dalam berkomunikasi.

### Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Kemendagri sebagai (pembuat kebijakan) sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) menyampaikan kebijakan SIPD kepada BAPPEDA kabupaten Seluma sebagai (pelaksana/implementor) kebijakan SIPD, maupun penyampaian informasi oleh BAPPEDA kabupaten Seluma kepada organisasi perangkat daerah (OPD/SKPD) pemerintah kabupaten Seluma terkait implementasi SIPD.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informasi dan komunikasi yang disampaikan oleh Kemendagri terhadap BAPPEDA Kabupaten Seluma berjalan dengan lancar yang disampaikan melalui surat secara langsung maupun melalui media sosial yaitu melalui grup *whatsapp* dan koordinasi melalui *Zoom Meeting*. BAPPEDA Kabupaten Seluma merupakan bagian dari pelaksana sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Kabupaten Seluma, dimana komunikasi antar OPD/SKPD bahwa BAPPEDA Kabupaten Seluma sebagai Koordinator mewajibkan menggunakan SIPD sehingga proses penyusunan perencanaan pembangunan dapat terstruktur, terangkan, dan terencana dengan baik. Di dalam SIPD sudah merangkum informasi terkait apa yang akan dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga SIPD merupakan suatu alat yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seluma

### Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kejelasan informasi yang disampaikan oleh Kemendagri sebagai (pembuat kebijakan) SIPD kepada BAPPEDA Kabupaten Seluma sebagai (pelaksana/implementor) kebijakan SIPD, maupun penyampaian informasi oleh BAPPEDA Kabupaten Seluma kepada organisasi perangkat daerah (OPD/SKPD).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa informasi yang diberikan dalam bentuk indikator kinerja dan program-program, kegiatan-kegiatan dan rincian objek sudah sangat jelas yang disampaikan melalui program Satu Data Indonesia (SDI) yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma, sehingga dalam proses perencanaan menjadi lebih baik, terukur dan jelas.



### Media

Media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media apa yang biasa digunakan dalam berkomunikasi terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan kabupaten Seluma.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara BAPPEDA Kabupaten Seluma dengan Kemendagri maupun komunikasi BAPPEDA Kabupaten Seluma dengan OPD/SKPD Pemerintah Kabupaten Seluma sudah cukup baik. Komunikasi dilakukan melalui surat, grup *WhatsApp*, *Zoom Meeting*, dan juga koordinasi secara langsung. Sedangkan penyampaian data informasi OPD/SKPD yang di perlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma melalui sistem satu data indonesia (SDI).

### Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sumber daya berupa Sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan fasilitas yang dapat mendukung implementasi SIPD dalam perencanaan pembangunan kabupaten Seluma.

### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pegawai/pejabat yang terlibat dalam implementasi implementasi SIPD. Sumber daya manusia merupakan hal yang paling mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi SIPD. Apabila para implementor tidak menguasai atau memahami terkait kebijakan yang akan diimplementasikan maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif bgritupun sebaliknya apabila implementor menguasai dan memahami kebijakan maka implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan dengan efektif sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SIPD di Kabupaten Seluma dimulai pada tahun 2020, dimana kemampuan operator SIPD di BAPPEDA Kabupaten Seluma sudah cukup mumpuni dalam mengoperasikan SIPD. Operator SIPD di BAPPEDA Kabupaten Seluma sudah cukup terlatih dalam mengoperasikan SIPD.

Walaupun cukup mumpuni dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) tetapi masih dibutuhkan bimtek agar kinerja operator SIPD di BAPPEDA Kabupaten Seluma lebih maksimal. Pegawai yang terlibat dalam implementasi SIPD di bidang perencanaan pembangunan sekitar 10 orang yang terdiri dari tiga (3) bidang mitra kerja yaitu bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi sosial budaya dan kemasyarakatan dan bidang perencanaan pembangunan dan evaluasi.

Berikut Data pejabat/pegawai yang terlibat dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di sub bidang perencanaan pembangunan:

**Tabel 2 Data Pejabat/pegawai SIPD Sub Bidang Perencanaan Pembangunan**

No	Nama Pegawai	Jabatan
1	Koordinator SIPD	4 orang
2	Operator SIPD	6 orang
<b>Total</b>		<b>10 orang</b>

Sumber: Data Pejabat/pegawai SIPD Sub Bidang Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Seluma

### Sumber Daya Finansial/Anggaran

Sumber daya finansial/anggaran merupakan dana anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi SIPD. Sumber daya finansial/anggaran juga merupakan hal yang paling mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi SIPD. Apabila dana anggaran tidak mencukupi untuk keperluan kebijakan yang akan di implementasikan maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif begitupun sebaliknya apabila dana anggaran mencukupi untuk keperluan kebijakan yang akan di implementasikan, maka implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan dengan efektif sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Seluma menggunakan anggaran APBD tahun berjalan Kabupaten Seluma sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Seluma yang telah disusun, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dari masing-masing pegawai yang ada. Sumber daya finansial sudah mencukupi tetapi masih diperlukan peningkatan untuk digunakan dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui diklat bimtek.

### **Fasilitas**

Fasilitas merupakan hal yang paling mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi SIPD. Apabila implementor tidak memiliki fasilitas yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fasilitas yang digunakan dalam implementasi SIPD sudah memadai, seperti tersedia laptop dan jaringan internet yang mendukung. Dalam implementasi SIPD terdapat kendala yang sering dihadapi seperti jaringan wifi yang lemot, kejadian listrik mati yang mengakibatkan wifi tidak bisa digunakan dan juga menyebabkan jaringan internetnya hilang. Adapun kendala lain yaitu dari system yang sering eror saat digunakan.

### **Disposisi**

Disposisi adalah watak atau sikap para implementor dalam mengimplementasikan Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Apabila implementor bersikap tegas dan mempunyai keinginan dalam mengimplementasikan SIPD maka proses implementasi SIPD dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Kegagalan dan keberhasilan implementasi SIPD juga didukung kuat oleh faktor sikap para implementor SIPD. Ketika implementor memiliki sikap perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan disposisi merupakan yang berkaitan dengan bagaimana sikap BAPPEDA Kabupaten Seluma sebagai pelaksana/implementor terkait dengan implementasi SIPD. Indikator struktur birokrasi dipengaruhi oleh sub indikator sikap ketegasan dan keinginan para implementor dalam mengimplementasikan SIPD Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma. Karena jika para implementor memiliki sikap yang tidak tegas dan tidak berkeinginan dalam implementasi SIPD maka kebijakan implementasi SIPD tidak dapat berjalan efektif seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BAPPEDA Kabupaten Seluma sudah berjalan dari tahun 2020 dan telah dilakukan updateing melalui SIPD Republik Indonesia, sehingga penggunaannya telah sesuai dengan aturan/amanat Peraturan Kemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang implementasi pemerintah daerah yang mewajibkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seluma menggunakan SIPD.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan yang bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan dan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan yang berkaitan dengan wewenang BAPPEDA kabupaten Seluma sebagai implementor kebijakan SIPD, serta apakah BAPPEDA kabupaten Seluma sebagai implementor kebijakan SIPD sudah bekerja sesuai standart prosedur operasional (SOP). Apabila implementor tidak mempunyai wewenang dan tidak bekerja sesuai dengan standart prosedur operasional (SOP) maka implementasi kebijakan menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Seluma sudah menyusun perencanaan pembangunan menggunakan SIPD sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, baik dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan RPJPD (dokumen perencanaan jangka 20 tahun), RPJMD (dokumen perencanaan untuk jangka 5 tahun), dan RKPD (dokumen perencanaan tahunan).

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan dokumen di lapangan diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Seluma melaksanakan SIPD dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seluma, dimana BAPPEDA Kabupaten Seluma bekerja menyusun perencanaan pembangunan daerah kabupaten Seluma sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP). Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Seluma salah satunya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menggunakan SIPD sejak tahun 2020. Penggunaan SIPD digunakan dari seluruh tingkatan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, serta OPD/SKPD yang saling berkaitan satu sama lain. Tahapan dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Seluma dimulai dari musrenbang dari desa/kelurahan di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma. Dasar Pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa pendekatan perencanaan terdiri dari pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dilaksanakan menurut jenjang



pemerintahan yang diselenggarakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.

Sebagai bentuk penyelarasan pada jenjang pemerintahan mulai dari lingkup terbawah, Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan merupakan proses penting dalam proses penyusunan dokumen pemerintahan tahunan di tingkat Kabupaten Seluma. Musrenbang kelurahan dan Kecamatan dilaksanakan sebagai upaya untuk semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Diakui bersama bahwa sasaran pembangunan adalah seluruh masyarakat, sehingga masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku yang ikut menentukan jalannya pembangunan. Partisipasi tersebut merupakan upaya agar operasionalisasi kebijakan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat banyak.

Tatalaksana Musrenbang Dalam pelaksanaannya, musyawarah pembangunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan (Januari), Kecamatan (Februari), kota (Maret), provinsi dan nasional (April). Hasil dari musyawarah di tingkat kelurahan menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan musyawarah di tingkat Kecamatan, dan seterusnya sampai dengan tingkat nasional.

Sebaliknya, dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan, musyawarah di tingkat awal juga perlu memperhatikan kebijakan di tingkat atasnya. Dalam konteks otonomi daerah, pelaksanaan musyawarah di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu memperhatikan regulasi dan kebijakan (*guidance*) yang telah diatur di tingkat pemerintah Kabupaten Seluma. Relevansi panduan Musrenbang ini dengan demikian juga untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) Pada tahun 2024 keseluruhan proses perencanaan daerah sudah menggunakan sistem baru secara online dengan menggunakan SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), yaitu sebuah sistem yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan menggunakan SIPD-RI ini, diharapkan seluruh proses pembangunan di daerah terintegrasi melalui sistem ini, baik dalam satu daerah, dengan daerah lain 6 maupun dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan SIPD ini, banyak sekali optimalisasi yang bisa dilakukan, terlebih jika diukur secara Nasional, di antaranya optimalisasi waktu, biaya dan tenaga di masing-masing tahapan dan jenjang perencanaan. Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah proses input usulan serta beberapa langkah lainnya berupa verifikasi dari Kecamatan, Bappeda dan OPD.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Seluma dalam indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan SIPD sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) karena dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya RKPD BAPPEDA Kabupaten Seluma sudah menggunakan SIPD dimulai dari kegiatan usulan aspirasi masyarakat dari kegiatan musrenbang kelurahan/desa hingga kecamatan sudah diinput menggunakan SIPD.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, yang berjudul Analisis Implementasi Sistem informasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan kabupaten Seluma bahwa implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat, dalam hal ini terdapat dua pihak yang berperan yaitu (Kemendagri) sebagai formulator atau pembuat keputusan dan (BAPPEDA kabuapten Seluma) sebagai pihak implementor. Kegiatan implementasi mencakup tindakan oleh implementor untuk melaksanakan kebijakan yang agar membuat program tersebut dapat berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori Menurut Edward III 1984 (dalam Tresiana & Duadji, 2019:59) Ada 4 (empat) isu pokok yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar menjadi efektif yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi SIPD dalam perencanaan pembangunan kabupaten Seluma sudah cukup baik pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

## **Komunikasi**

Komunikasi antara Bappeda Kabupaten Seluma sebagai implementator kebijakan SIPD dengan Kemendagri sebagai formulator atau pembuat kebijakan SIPD terjalin cukup baik. Komunikasi biasanya dilakukan melalui surat, grup WhatsApp maupun melakukan koordinasi melalui Zoom Meeting atau untuk suatu keadaan BAPPEDA juga melakukan kunjungan langsung kepada pihak Kemendagri. Sama halnya komunikasi antara BAPPEDA kabupaten Selumadengan OPD/SKPD pemerintah kabupaten Seluma juga sudah cukup baik. Komunikasi dilakukan melalui surat, grup WhatsApp, dan juga Koordinasi secara langsung. Penyampaian data informasi OPD/SKPD yang di perlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten Seluma dalam bentuk indikator kinerja dan program-program, kegiatan-kegiatan dan rincian objek sudah sangat jelas yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten seluma dalam sistem SIPD sehingga dalam proses perencanaan itu sendiri menjadi lebih baik, terukur karena sekarang ini penyampaian data informasi OPD/SKPD yang di perlukan

dalam penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten Seluma sudah melalui sistem Satu Data Indonesia (SDI). OPD/SKPD pemerintah kabupaten Seluma menyampaikan informasi data dengan cara menginput data melalui portal Satu Data Indonesia (SDI).

### Sumber Daya

Sumber daya yang di perlukan dalam SIPD di Bappeda Kabupaten Seluma juga sudah cukup baik. Namun dalam sub indikator sumber daya manusia masih belum maksimal karena kurangnya program diklat, bimtek dan sebagainya untuk operator SIPD di BAPPEDA Kabupaten Seluma, sumber daya finansial/anggaran maupun fasilitas yang digunakan sudah memadai. Sedangkan untuk pegawai yang terlibat dalam implementasi SIPD di bidang perencanaan pembangunan sekitar 10 orang. Dana Anggaran yang berasal dari APBD juga sudah mencukupi. Fasilitas yang disediakan berupa laptop dan jaringan wifi juga sudah memadai, namun ada sedikit kendala yang hadapi yaitu terkait jaringan wifi yang lemot, kejadian listrik mati yang otomatis membuat wifi tidak bisa digunakan selain itu pemadaman listrik biasanya juga menyebabkan jaringan internet hilang adapun kendala lain yaitu dari sistemnya sendiri yang sering eror saat digunakan.

### Disposisi

Disposisi adalah watak atau sikap para implementor dalam mengimplementasikan SIPD sudah tegas dan memiliki keinginan untuk melaksanakan SIPD karena mengingat implementasi SIPD ini merupakan amanat dari Kemendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan sistem ini maka BAPPEDA kabupaten Seluma sudah menggunakan sistem ini sejak sistem ini di berlakukan.

### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan SIPD sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) karena dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya RKPD BAPPEDA Kabupaten Seluma sudah menggunakan SIPD dimulai dari kegiatan usulan aspirasi masyarakat dari kegiatan musrenbang kelurahan/desa hingga kecamatan sudah di input menggunakan SIPD. Implementasi SIPD di BAPPEDA kabupaten Seluma harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sedangkan untuk wewenang dalam implementasi SIPD BAPPEDA kabupaten Seluma mempunyai wewenang menyusun dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang penyusunannya melalui SIPD.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori Edward III 1984 (dalam Tresiana & Duadji, 2019:59) ada 4 (empat) isu pokok yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar menjadi efektif yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan kabupaten Seluma sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Komunikasi: Komunikasi antara BAPPEDA kabupaten Seluma terhadap Kemendagri maupun OPD/SKPD pemerintah kabupaten Seluma dilakukan melalui surat, grup whatsapp, zoom meeting maupun melakukan koordinasi langsung. Penyampaian data informasi OPD/SKPD yang di perlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan juga sudah lengkap dan jelas. Data informasi di sampaikan dengan cara menginput data informasi melalui portal satu data Indonesia (SDI).
2. Sumber daya: Sumber daya yang ada di BAPPEDA juga sudah cukup baik dan terpenuhi, kemampuan operator sudah cukup mumpuni dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) walaupun belum seara maksimal karena kurangnya program diklat, bimtek dan sebagainya untuk operator SIPD di BAPPEDA kabupaten Seluma, Dana anggaran yang berasal dari APBD juga sudah mencukupi serta fasilitas yang digunakan dalam implementasi SIPD berupa laptop dan jaringan internet juga sudah memadai. Meskipun ada sedikit kendala terkait jaringan internet yang lemot dan aplikasi yang eror namun pelaksanaan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah cukup baik.
3. Disposisi: Disposisi atau sikap para implementator di BAPPEDA kabupaten Seluma sudah cukup baik. Para implementator sudah memiliki sikap ketegasan dan berkeinginan dalam mengimplementasikan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat peraturan Kemendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



yang mewajibkan BAPPEDA kabupaten Seluma melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah menggunakan SIPD.

4. Struktur birokrasi: Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan SIPD sudah cukup baik karena sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP). Implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Seluma sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sedangkan untuk wewenang dalam implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Seluma mempunyai wewenang menyusun dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang penyusunannya melalui SIPD.

### Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka sangat penting bagi penulis untuk memberikan beberapa rekomendasi ataupun saran sebagai berikut:

1. Kemampuan sumber daya manusia/operator sistem sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) merupakan faktor yang paling mendukung terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Maka saran yang akan penulis berikan adalah sebaiknya dilakukan pelatihan khusus untuk pegawai/operator sistem informasi pemerintah daerah (SIPD)
2. Atasan harus lebih tegas lagi dalam implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Seluma.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, Wiliam N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Ekaputra, N. D. 2021. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk. Otonomi, 21.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Membangun Aplikasi e-Government. Yogyakarta: Andi.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Lorita, Evi. 2015. Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jurnal Professional. Vol. 2 No. 2 Tahun 2015.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol.6 No.1. 3-4.
- Moleong, L. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN.
- Permengari Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Demerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmad, Jalaludin. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Edisi Revisi. Bandung: Remaja Karya.
- Suaib, M. R. 2016. Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: CALPULIS.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman. 2019. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tresiana, Novita. 2016. Pengantar Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Uddin, Nasir. 2021. Electroniv Government for Trust Building. 1-111.

- Wahab, Solikhin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Jakarta: Media Pressindo.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. 2020. Penerapan prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi, Vol. 5 No. 1 : 65-84.